

## DAFTAR PUSTAKA

### A) BUKU

- Hartanti, Evi (2009), *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2006), *Memahami untuk Membasmi*, Penerbit: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Yamin, Moh (2016), *Pendidikan Anti Korupsi*, PT. REMAJA ROSDAKARYA, Bandung
- Ardisasmita, M. Syamsa (2006), *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Jakarta
- Santosa, Prayitno Iman (2015), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

### B) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 999).

### C) INTERNET

- Diskominfo Mojokerto, *Sejarah Kota Mojokerto*, <https://web.mojokertokota.go.id/beranda> diakses pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 23.16 WIB.

**D) LAIN-LAIN**

Wawancara dengan Bpk. Erwan Adi Priyono, Kasubsi Penyidikan,  
Prosedur Penuntutan Perakara Tindak Pidana Korupsi di  
Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, 11 Juni 2023.